



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Tak Kembalikan Aset Mobnas Dewan Bisa Rugikan Negara**

**BENGKULU, BE** - Belasan mobil dinas yang masih dikuasai sejumlah mantan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu jika tidak cepat dikembalikan bisa menjadi potensi kerugian negara. Aset mobnas tersebut bisa berkurang nilai jualnya, Sehingga negara bisa dirugikan.

"Seharusnya pejabat yang masih menguasai mobnas tersebut malu. Karena mereka sudah tidak memiliki hak untuk menguasai aset mobnas," kata Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki), Melyan Sori, Jum'at (3/1).

Kelakuan mereka sangat memalukan, mereka sudah tidak berhak menggunakan mobnas tersebut. Integritasnya sangat lemah, nekat menggunakan aset negara yang sudah tidak berhak untuk mereka. Apalagi ada salah satu mantan dewan sampai menguasai 3 mobil," jelas Melyan.

Jika sekwan tidak cukup membuat mantan pejabat mengembalikan mobil maka Gubernur harus turun langsung mengintruksikan bawahannya untuk segera menyelesaikan permasalahan aset tersebut.

"Sekwan itu perpanjangan tangan eksekutif, jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu Gubernur harus segera menginstruksikan bawahan untuk segera melakukan eksekusi terhadap aset mobnas tersebut," jelas Melyan.

Terkait aset tersebut, seharusnya aparat penegak hukum bisa langsung menindak lanjutinya tanpa harus menunggu laporan. Karena sudah jelas disebutkan oleh Sekretariat Dewan ada 11 unit mobnas belum dikembalikan mantan pejabat. "Aparat penegak hukum seharusnya bisa masuk tanpa menunggu laporan," imbuhnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu, Amanda Syah Arwan SH MH melalui

Kasi Penkum, Marthyn Luther SH MH mengaku Kejati Bengkulu belum menerima laporan terkait dugaan penggelapan aset tersebut.

Seharusnya Sekretariat Dewan memastikan, apakah aset tersebut belum dikembalikan atau malah sudah dijual. Jika aset mobnas tersebut dijual oleh mantan pejabat sudah pasti pelanggaran dan bisa dikenakan pidana. Seharusnya pejabat yang bersangkutan segera mengembalikan mobnas tersebut jika memang alasannya untuk dilelang. "Terkait aset ini setau saya belum ada masuk ke Kejati. Terkait aset mobnas tersebut, jika dijual iya penggelapan," jelas Kasi Penkum.

Sementara itu, sejumlah mantan wakil rakyat itu bersikukuh tidak ingin mengembalikan mobnas tersebut ke Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Seperti Patrice Rio Capella yang memegang mobnas jenis Fortuner dengan nomor polisi (nopol) BD 1265 CY itu, tidak ingin mengembalikan, sebelum DPRD Provinsi Bengkulu melakukan lelang mobnas.

"Sesuai aturan disebutkan, kepada pimpinan dewan diberikan mobnas untuk dilelang, diutamakan pimpinan dewan. Harusnya pemda ajukan proses lelangnya," ungkap Rio saat dikonfirmasi BE, kemarin (3/1).

Rio mengklm sesuai dengan aturan, bahwa mobnas yang diberikan saat dirinya masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu

periode 2004-2009, boleh dimiliki secara pribadi.

Namun tetap menggunakan proses lelang, yang diutamakan dimemangkan untuk pimpinan dewan itu sendiri. Sudah sampai 10 hingga 12 tahun saya tunggu, kapan lelangnya. Ternyata sampai saat ini belum juga melakukan lelang," tuturnya.

Menurut Rio yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai NasDem itu menegaskan, sejak tahun 2009 dirinya menggunakan mobnas itu sudah ada dasarnya. Dasar itu berupa surat izin pakai yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Bengkulu saat itu.

Termasuk aturan yang diklaimnya, mobnas itu dilelang untuk dimenangkan untuk dirinya sendiri sebagai mantan pejabat negara. Bukan dilelang secara umum. "Mobil ini sudah tua. Presiden dan Menteri itu, kalau mobnasnya sudah 5 tahun bisa dilelang. La sekarang itu siapa yang salah?," tanya Rio.

Belum lagi menurut Rio, selama digunakan mobnas itu dirawat secara pribadi, tidak menggunakan uang negara. Banyak uang pribadinya sudah dikeluarkan untuk menggunakan mobnas tersebut.

"Masalahnya, merawatnya saya pakai biaya sendiri. Artinya mobil itu masih dirawat, tanpa uang negara," singgungunya.

Ketika ada dasarnya untuk mengambil mobnas itu, Rio menegaskan akan mengembalikannya secara sukarela. "Kalau ada aturannya